

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel belanja modal merupakan determinan signifikan yang meningkatkan peluang suatu daerah melakukan pinjaman. Nilai koefisien positif serta *odds ratio* yang lebih besar dari satu mengindikasikan bahwa semakin besar investasi daerah dalam pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang, semakin besar pula kecenderungan daerah untuk memanfaatkan instrumen pinjaman sebagai sumber pembiayaan. Hal ini sejalan dengan teori keuangan publik yang menempatkan pinjaman sebagai instrumen untuk mendanai proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat antargenerasi.

2. Variabel transfer pusat terbukti berpengaruh signifikan dan berarah negatif terhadap peluang pinjaman daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa daerah yang memperoleh alokasi transfer yang besar dari pemerintah pusat cenderung memiliki kebutuhan lebih rendah untuk berhutang, karena tekanan pembiayaan pembangunan telah terpenuhi melalui mekanisme transfer fiskal. Hasil ini mengonfirmasi bahwa struktur hubungan keuangan intergovernmental di Indonesia masih sangat menentukan perilaku fiskal daerah, termasuk keputusan untuk menggunakan pinjaman.

3. Variabel defisit anggaran berpengaruh signifikan terhadap peluang pinjaman daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar defisit yang dialami suatu daerah, semakin tinggi kecenderungan daerah tersebut untuk menggunakan pinjaman sebagai alat stabilisasi fiskal. Dengan demikian, meskipun terdapat regulasi fiskal yang ketat, defisit tetap menjadi pendorong perilaku berhutang, terutama bagi daerah yang menghadapi kebutuhan pembiayaan jangka pendek maupun ketidakcukupan pendapatan rutin.

4. Variabel tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu daerah,

semakin kecil kemungkinan daerah tersebut untuk mengakses pinjaman daerah. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah miskin, serta tingginya risiko fiskal yang menyebabkan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung tidak memenuhi syarat kelayakan pinjaman dan lebih mengandalkan bantuan non-utang dari pemerintah pusat.

5. Variabel desentralisasi fiskal dan PDRB perkapita tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pinjaman daerah. Walaupun arah koefisien memberikan gambaran kecenderungan fiskal yang informatif, besarnya tidak cukup kuat secara statistik untuk menjelaskan variasi pinjaman antar kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor kemampuan fiskal internal belum menjadi determinan utama penggunaan pinjaman dibandingkan dua faktor yang terbukti signifikan, yakni transfer pusat dan belanja modal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peluang pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman, seperti transfer pusat, belanja modal, defisit anggaran, dan tingkat kemiskinan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan pinjaman daerah maupun untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan belanja modal agar penggunaan pinjaman benar-benar diarahkan pada kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Daerah perlu memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibiayai dengan pinjaman memiliki perencanaan matang, analisis kelayakan yang kuat, serta mekanisme evaluasi yang ketat untuk menghindari risiko utang yang tidak produktif.

2. Pemerintah pusat diharapkan dapat mengoptimalkan mekanisme transfer fiskal secara lebih proporsional agar daerah tidak mengalami ketergantungan yang berlebihan. Desain transfer sebaiknya mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal antar daerah, serta diberi insentif bagi daerah yang mampu mengelola

keuangannya secara mandiri, sehingga penggunaan pinjaman dapat diarahkan pada daerah yang benar-benar membutuhkan.

3. Daerah perlu memperkuat kapasitas fiskal internal, terutama melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja agar daerah dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan lebih leluasa dalam mengambil keputusan pembiayaan termasuk penggunaan pinjaman.

4. Diperlukan strategi pengendalian defisit melalui optimalisasi pendapatan, penajaman prioritas belanja, dan evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran. Pengelolaan defisit yang baik akan membantu daerah menghindari ketergantungan berlebihan pada pinjaman dan menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.

5. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sistem pengawasan serta transparansi penggunaan pinjaman daerah. Dengan memastikan bahwa proses pengajuan, penggunaan, dan pelaporan pinjaman dilakukan secara akuntabel, risiko moral hazard dan pembiayaan proyek yang tidak produktif dapat diminimalkan. Sistem monitoring yang baik juga akan membantu menilai efektivitas penggunaan pinjaman dalam jangka panjang.

6. Untuk penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang tidak dapat dimasukkan dalam penelitian ini, seperti kualitas tata kelola pemerintahan, kapasitas birokrasi, stabilitas politik daerah, indeks pembangunan infrastruktur, maupun faktor institusional lainnya yang diyakini turut mempengaruhi keputusan pinjaman daerah. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan *dynamic panel*, *spatial econometrics*, atau memasukkan analisis diferensiasi antar wilayah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pola pinjaman daerah di Indonesia.

7. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan data dengan tingkat detail yang lebih tinggi, seperti data tahunan per jenis pinjaman atau data proyek yang dibiayai pinjaman, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai pengaruh pinjaman terhadap pembangunan daerah. Pengembangan metode pengukuran yang memasukkan elemen risiko fiskal juga akan memberikan nilai tambah dalam memahami keberlanjutan penggunaan pinjaman.